



Media: Joglo Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 24 Juli 2023

Halaman: 2

Kecurangan PPDB Disebut bukan Kesalahan Sistem

YOGYAKARTA, *Joglo Jateng* – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya. Hal itu dikatakannya sesuai menu-

tup Seminar National Cooperative Summit 2023 di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, Sabtu (22/7).

Menurut Muhadjir, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan menetapkan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Ia

mencontohkan jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang, seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat.

"Paling tidak enam bulan sebelumnya. Tidak hanya mendadak karena intake-nya sudah jelas yang mau masuk SMP itu kan anak kelas 6 SD di zona itu yang harus dipri-

oritaskan," ujar dia.

Muhadjir menilai, sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi. "Nanti balik kompetisi bebas siapa yang punya duit, sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak

yang dapat kuota, punya kursi, punya hak memasukkan siapa saja di sekolah yang disebut favorit," terangnya.

Bahkan, menurut dia, belajar dari sistem lama guru juga ikut berlomba-lomba untuk dapat mengajar di sekolah negeri favorit. Muhadjir menuturkan, pemberlakuan sistem zonasi memiliki semangat perbaikan, terutama untuk menghilang-

kan fenomena "kastanisasi" sekolah negeri.

"Ada sekolah-sekolah tertentu yang diperebutkan habis-habisan sementara ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Itu yang dulu kita hilangkan dengan basis zonasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Muhadjir, kebijakan itu juga bertujuan mewujudkan pemer-

ataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. "Kalau sampai sekarang masih ada pandangan orang tua berebut sekolah tertentu, ya berarti jangan salahkan sistemnya, yang salah itu mestinya pemerintah daerahnya kenapa sudah enam tahun kok belum bisa menciptakan pemerataan pendidikan di tempatnya," jelasnya. (ara/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005